

EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN KOTA MALANG



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR**

DASAR HUKUM

- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan

DEFINISI

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan.

- menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

MAKSUD

TUJUAN

- melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember

LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN

- 1. Diawali dengan pelaksanaan Evaluasi Diri sesuai dengan Lampiran II Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 oleh seluruh Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari minggu ke III.**
- 2. Tim penilai Kecamatan melakukan pemeringkatan Desa dan Kelurahan berdasarkan hasil evaluasi diri.**
- 3. Desa dan Kelurahan yang memiliki skor dengan kategori cepat berkembang dapat diikutsertakan dalam Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan.**
- 4. Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan meliputi tahapan penilaian administrasi, klarifikasi dan pemaparan. Sedangkan sistematika penilaian untuk setiap tahapan diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan indikator dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015.**
- 5. Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati/Walikota.**

LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN

Keanggotaan Tim Penilai Tingkat Kecamatan terdiri dari:

- Camat selaku Ketua**
- Sekretaris Camat**
- Kasi Pemerintahan**
- Tim Penggerak PKK Kecamatan**
- Unsur lainnya**

Pembiayaan :

Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan ini dibiayai oleh anggaran Kecamatan serta sumber lainnya yang sah.

LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN/ KOTA

1. Kabupaten/Kota melakukan Lomba Desa dan Kelurahan setelah menerima hasil Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan.
2. Tim Penilai Kabupaten/Kota melakukan **analisis dan validasi** data Desa dan Kelurahan dari juara tingkat Kecamatan.
3. Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan meliputi tahapan penilaian administrasi, klarifikasi dan pemaparan. Sedangkan sistematika penilaian untuk setiap tahapan disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan indikator dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015.
4. Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan **Keputusan Bupati/Walikota**.

LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN/ KOTA

- **Peserta Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota adalah Desa dan Kelurahan yang menjadi juara I (satu) tingkat Kecamatan yang berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.**
- **Keanggotaan Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari:**
 - 1. Badan/Dinas/Bagian yang menangani Pemerintahan Desa dan Kelurahan**
 - 2. OPD terkait**
 - 3. Tim Penggerak PKK Kabupaten/ Kota**
 - 4. Pakar**
 - 5. Akademisi**
 - 6. Unsur lainnya**
- **Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota dianggarkan dari APBD Kabupaten/Kota serta sumber yang sah lainnya.**

PEMANTAUAN & PENILAIAN

PERMENDAGRI NO 81 TAHUN 2015

Januari – Minggu
III Pebruari

Minggu IV
Pebruari - Maret

Minggu I April
dilaporkan ke Kota

Evaluasi Diri di
Tingkat Desa
dan Kelurahan

Penilaian di
tingkat
Kecamatan

Analisis, validasi, pe
ninjauan,
klarifikasi, dan pem
eringkatan

JADWAL TENTATIF PROVINSI

EVALUASI BIDANG

PEMERINTAHAN

Pemerintahan

Kinerja

Inisiatif dan Kreativitas

IT

Pelestarian Adat dan Budaya

KEWILAYAHAN

Identitas

Batas

Inovasi

TAGANA

Investasi

KEMASYARAKATAN

Partisipasi Masyarakat

Lembaga Masyarakat

PKK

Trantib

Pendidikan

Kesehatan

Ekonomi

Penanggulangan Kemiskinan

Kapasitas Masyarakat

PENILAIAN STATUS KELURAHAN



≥ 351
CEPAT BERKEMBANG



201-350
BERKEMBANG



≤ 200
KURANG BERKEMBANG

PERSYARATAN DOKUMEN LOMBA KELURAHAN

- **Profil Desa dan Kelurahan 2 (dua) tahun terakhir**
- Dokumen perencanaan bagi Kelurahan
- Laporan pemantauan perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana **Lampiran I Permendagri Nomor 81 Tahun 2015**
- Semua kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan sebagaimana yang terdapat pada **lampiran II Permendagri Nomor 81 Tahun 2015**
- Laporan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana format **Lampiran III Permendagri Nomor 81 Tahun 2015**

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI JUARA LOMBA DESA DAN KELURAHAN

- Bentuk apresiasi kepada juara Lomba Desa dan Kelurahan di masing-masing tingkatan dapat diberikan penghargaan berbentuk, Piala, Piagam, Program serta kegiatan untuk memajukan Desa dan Kelurahan.
- Penghargaan bagi seluruh juara I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi oleh Pemerintah Pusat akan dilaksanakan pada kegiatan gabungan **Temu Karya Nasional dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel)**.

INOVASI BIDANG PEMERINTAHAN

1. Pelayanan Online (e-Gov) contoh; SisKeuDes, SiPaDes, Profil Desa Online/Offline, SiAdek (Kab. Badung), Sodamolek (Kota. Kupang), SiapManda (Kota Tebing Tinggi), Sistem Informasi Kepemilikan Tanah di Kabupaten Malang Jawa Timur.
2. Membuat Desa/Kelurahan Tematik contoh; Desa Karanglo (Desa Matematika), Desa Pare (Kampung Inggris), Kampung Korea di Kab. Bau- bauSulawesi Tenggara, Kelurahan Kubu (Desa Wisata Panglipuran) di Kab. Bangli, Kampung Warna-warni di Kota Malang.
3. Perdes yang mengkaitkan usia dengan Pendidikan minimal untuk menikah contoh Desa Batu Putih di Kab. Sumbawa Barat dan Desa Tengger Kab. Probolinggo.
4. Peningkatan penggunaan Bahan pokok lokal yang ada di Desa dan Kelurahan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan contoh: Setiap hari Senin makan Jagung (Senja), Selapi (Selasa Pisang) di Kab. Bantaeng

INOVASI BIDANG KEWILAYAHAN

1. Perencanaan (RPJMDes dan RKP) yang mengakomodir tematik contohnya untuk Kaum disabilitas dan kaum perempuan.
2. Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kota Bukittinggi dan Kelurahan Tlogomas Kota Malang kerjasama dengan Perguruan Tinggi setempat untuk penyediaan akses internet bagi warga Kelurahan.
3. Pembuatan Energi baru terbarukan contoh: Pembuatan Energi Listrik dari Buah Nyamplung di Desa Panggunharjo Kab. Bantul, Pengembangan Biogas untuk Rumah Tangga di Kelurahan Merangin Kota Jambi, *Hybrid Energy One Pole* (Energi Tenaga Surya dan Angin) di Desa Ujung Alang di Kab. Cilacap, Energi Tenaga Surya di Desa Kubu Kab. Karang Asem, Pembangkit listrik tenaga *biomassa* di Desa Ponggaila Prov. Gorontalo

INOVASI BIDANG KEMASYARAKATAN

1. “Polisi” ASI pengawasan penjaminan pemberian ASI kepada bayi di Desa Pata’padang Kab.Toraja Utara;
2. Perdes/Keputusan Lurah tentang kawasan dilarang merokok contoh: Perdes Desa Bebas Asap Rokok di Desa Batubelerang Kab. Sinjai
3. Tabungan Masyarakat (TaMasya) dan *Callcenter* Desa di Desa Gunung Rejo Kab. Pesawaran;
4. Taman Inflasi contoh : Dengan menanam cabai dan sayuran di Desa Lingsar Kab. Lombok Barat

FAKTOR EKSTERNAL PENGARUH NILAI

1. Ketersediaan Peraturan Bupati tentang SOTK Desa
2. Kesesuaian SOTK Desa dengan Peraturan Bupati Tentang SOTK Desa
3. Kesesuaian SOTK Desa dengan Profil Desa
4. Ketersediaan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa
5. Alokasi ADD sesuai dengan ketentuan
6. Kesesuaian RPJMD dan RPJMDes
7. Ketersediaan Peta Batas Desa
8. Kesiapan Tanggap bencana berupa Peta bencana, sistem deteksi dini bencana, pelaksanaan simulasi, daerah evakuasi bencana dan dokumen Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD)
9. Langkah yang ditempuh dalam penanggulangan kemiskinan
10. Kelengkapan Lampiran I dan III Permendagri Nomor 81 Tahun 2015

FAKTOR INTERNAL PENGARUH NILAI

1. Pemakai narkoba di Desa/Kelurahan
2. Warga Desa/Kelurahan yang terlibat terorisme atau gerakan yang bersifat radikal
3. Masih terdapat bayi kekurangan gizi
4. Data dalam tahap penilaian administrasi yang disampaikan tidak sesuai fakta
5. Kelengkapan Lampiran II Permendagri Nomor 81 Tahun 2015
6. Pengelolaan sampah dan air limbah
7. Keberadaan Hutan Desa / Ruang Terbuka Hijau Kelurahan
8. Keberadaan Lingkungan kumuh

APLIKASI EPDESSEL

epdeskel.kemendagri.go.id/app_Login/



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

APLIKASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA

Masuk ke Aplikasi

Masuk

DASHBOARD PERKEMBANGAN DESA/KEL TA 2019



Jumlah Desa Kurang Berkembang

0



Jumlah Desa Berkembang

0



Jumlah Desa Cepat Berkembang

0



Jumlah Kelurahan Kurang Berkembang

0



Jumlah Kelurahan Berkembang

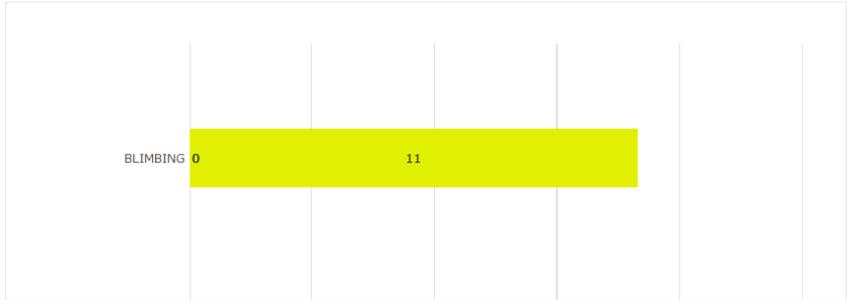
0



Jumlah Kelurahan Cepat Berkembang

0

Perkembangan Kecamatan



Perkembangan Desa



LAOH MAHFUD/RADAR MALANG

PENERIMAAN PENGHARGAAN









TERIMA

KASIH